

Konfigurasi Politik dan Produk Kebijakan Administratif: Studi Relasi Kekuasaan dalam Pengelolaan Anggaran Pemerintah Kalimantan Timur

Andre Pasaribu^{1*}, Erizal², Aryo Salasa³

¹⁻³ Afiliasi: UIN Sunan Kalijaga, prodi Ilmu syariah, fakultas Hukum dan Syariah, Yogyakarta

Email Korespondensi: 25203011002@student.uin-suka.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 1839 - 1855

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3479>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3479>

Article History:

Received: 16-07-2026

Revised: 06-08-2026

Accepted: 06-08-2026

Abstract : *Administrative policies at the local level often do not emerge as neutral technocratic instruments, but rather become an arena for the bargaining of interests among the ruling elite. This study aims to analyze the influence of political configurations on the formulation of administrative policies regarding the management of the Regional Budget (APBD) in East Kalimantan Province, to explore the power relations among bureaucratic actors, and to examine public responses to budget allocation policies perceived as elitist. Using a qualitative method with a socio-legal approach, primary data was collected through observation of public responses and statements by officials, while secondary data was obtained from APBD documents, regulations, and media reports. The research findings indicate that the procurement of a governor's official vehicle worth Rp.8.5 billion and a laundry budget for the official residence amounting to Rp.450 million reflect the characteristics of an authoritarian political configuration, where administrative legality is used to legitimize policies that are irrational and fail to prioritize public needs. This sparked unrest in the form of demonstrations by thousands of students and civilians, as these expenditures were viewed as wasteful amid a slowdown in regional development. However, massive public pressure, combined with oversight from the KPK, ultimately succeeded in leading to the cancellation of the procurement of these luxury official vehicles. This phenomenon underscores that social control and digital media play a vital role as a counterbalance to limit the dominance of executive power. This study recommends the need for reform of oversight by the central government, the influence of inclusive public participation, and the transformation of local political structures to achieve budget management that is transparent, accountable, and responsive to the public's well-being.*

Keywords: *Political Configuration, Administrative Policy, Power Relations*

Abstrak : Kebijakan administratif di tingkat daerah sering kali tidak lahir sebagai instrument teknokratis yang netral, melainkan menjadi arena tawar menawar kepentingan para elite penguasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh konfigurasi politik terhadap pembentukan produk kebijakan administratif dalam pengelolaan APBD di Provinsi Kalimantan Timur, mengeksplorasi relasi kekuasaan aktor birokrasi, serta mengkaji respons sosial terhadap kebijakan penggunaan anggaran yang dinilai elitis. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan socio-legal, data primer dikumpulkan melalui observasi respon publik dan pernyataan pejabat, sementara data sekunder diperoleh melalui dokumen APBD, regulasi, serta pemberitaan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan mobil dinas Gubernur senilai Rp.8,5 miliar dan anggaran laundry rumah jabatan sebesar Rp.450 juta mencerminkan karakteristik konfigurasi politik otoriter, di mana legalitas administratif digunakan untuk melegitimasi

kebijakan yang tidak rasional dan kurang berpihak pada kebutuhan publik. Hal ini memicu pergolakan berupa demonstrasi ribuan mahasiswa dan warga sipil akibat dinilai sebagai bentuk pemborosan di tengah perlambatan pembangunan daerah. Namun, tekanan publik yang massif bersama dengan pengawasan KPK akhirnya berhasil mendorong pembatalan pengadaan mobil dinas mewah tersebut. Fenomena ini menegaskan bahwa kontrol sosial dan media digital memiliki peran vital sebagai penyeimbang guna membatasi dominasi kekuasaan eksekutif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi pengawasan oleh pemerintah pusat, pengaruh partisipasi publik yang inklusif, serta transformasi konfigurasi politik daerah demi mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Katakunci: Konfigurasi Politik, Kebijakan Administratif, Relasi Kekuasaan

PENDAHULUAN

Konfigurasi politik memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan produk hukum dan kebijakan administratif di daerah. Dalam praktik pemerintahan daerah, kebijakan administratif tidak selalu lahir sebagai instrument teknokratis yang netral, melainkan sering kali di pengaruhi oleh relasi kekuasaan dalam dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah.¹ Fenomena tersebut terlihat dalam beberapa kebijakan pemerintah provinsi Kalimantan Timur yang menuai kontroversi publik, seperti pengadaan mobil dinas Gubernur senilai Rp.8,5 miliar dan anggaran laundry rumah jabatan sebesar Rp.450 juta dari dana APBD. Kebijakan tersebut memunculkan kritik karena dianggap tidak sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat, serta tidak sesuai dan bertentangan dengan prinsip-prinsip umum tata kelola pemerintahan yang baik dalam kerangka hukum administrasi sebagai strategi untuk mendorong pengelolaan anggaran daerah yang lebih efisien dan akuntabel di era desentralisasi fiskal.² Hubungan antar aktor membentuk jaringan yang terstruktur dan sistematis serta menyusun strategi untuk mengakomodasi kepentingan aktor dalam APBD.³ Oleh karena itu, perlunya memahami dan mengatasi faktor-faktor penyebab penyalahgunaan kewenangan untuk menciptakan produk-produk kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat di daerah.

Penelitian sebelumnya mengenai hukum administrasi cenderung menempatkan kebijakan administratif sebagai produk legal-formal yang berorientasi pada prosedur dan legalitas, Namun, studi-studi tersebut belum banyak menyoroti bagaimana konfigurasi politik mempengaruhi substansi kebijakan administratif, serta bagaimana intervensi politik dalam penentuan prioritas anggaran.⁴ kebutuhan akan legitimasi politik, dan pertemuan gesekan antara pengetahuan, kepentingan, dan praktik politik membentuk efek tata kelola yang dihasilkan.⁵ Kebijakan yang di bentuk sering kali tidak rasional, dan sesuai dengan kebutuh masyarakat. Politisasi birokrasi dan meningkatnya hubungan bisnis-pemerintah merupakan ciri penting dari dinamika parlemen di tingkat nasional dan

¹ Mira Fatimah dkk., "Central-Local Government Relations in Regional Planning and Budgeting in Indonesia: Between Autonomy and Control," *Policy & Governance Review* 8, no. 2 (2024): 131–53, <https://doi.org/10.30589/pgr.v8i2.922>.

² Fitria Fitria dkk., "Administrative Law and the Efficiency of Local Government Budgeting," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (2025): 147–61, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.27598>.

³ Muh Hamka dkk., "POLITIK ANGGARAN DAN RELASI AKTOR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH," *Jurnal Politik Profetik* 10, no. 1 (2022): 79–98, <https://doi.org/10.24252/profetik.v10i1a5>.

⁴ Muhammad Najib dan R. M. Mahendrardi, "Pengawasan Internal Hukum Terhadap Penyusunan Anggaran Daerah Di Indonesia," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 6, no. 1 (2026): 10–10, <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3316>.

⁵ John F. McCarthy dkk., "Land reform rationalities and their governance effects in Indonesia: Provoking land politics or addressing adverse formalisation?," *Geoforum* 132 (Juni 2022): 92–102, <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.04.008>.

dilaporkan semakin intensif di tingkat lokal.⁶ Selain itu, interaksi antara kekuasaan dalam arti sebenarnya sering mengalami konflik kepentingan,⁷ dalam hal ini terlihat jelas dalam produk-produk kebijakan administratif yang hanya berorientasi pada kepentingan elite pemerintahan. Dengan demikian, perlunya penyesuaian regulasi turunan agar lebih responsif terhadap dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat daerah.⁸

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, menjelaskan bagaimana konfigurasi politik memengaruhi pembentukan produk kebijakan administratif dalam pengelolaan APBD Provinsi Kalimantan Timur. Kedua, menganalisis relasi kekuasaan antara elite politik, birokrasi, dan instrument hukum administratif dalam proses pembentukan kebijakan dalam penganggaran daerah. Ketiga, mengkaji respon social masyarakat terhadap kebijakan administratif penggunaan APBD yang di persepsikan elitis dan tidak berpihak kepada kepentingan publik. Melalui pemetaan tersebut, penelitian ini berharap dapat berkontribusi pada upaya pentingnya kesadaran pemerintah untuk membentuk produk-produk kebijakan yang mengarah kepada kepentingan masyarakat serta agar masyarakat memiliki kesadaran terhadap pentingnya pengawasan terhadap setiap kebijakan yang di buat oleh pemerintahan agar setiap regulasi yang di tetapkan menjawab kebutuhan masyarakat di Kalimantan Timur.

Penulisan ini dibangun berdasarkan tiga argument utama. Pertama, produk kebijakan administratif tidak pernah sepenuhnya netral, karena di pengaruhi Konfigurasi politik oleh penguasa daerah. Kedua, pengelolaan APBD bukan hanya mekanisme administratif, tetapi juga sebagai arena kepentingan para elite penguasa dan legitimasi elit politik. Ketiga, tekanan publik dan kontrol sosial memiliki peran penting dalam membatasi dominsi kekuasaan administratif dalam pembentukan produk-produk kebijakan dan pengelolaan anggaran daerah. Dengan menggabungkan penelitian yang ada dan bukti empiris yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang cermat dan berwawasan luas tentang masalah Konfigurasi Politik dan Produk Kebijakan Administratif terhadap Relasi Kekuasaan dalam Pengelolaan Anggaran Pemerintah Kalimantan Timur.

KAJIAN LITERATUR

Konfigurasi politik otoriter merupakan pola kekuasaan yang menempatkan pemerintah sebagai aktor yang sangat dominan serta aktif mencampuri penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara. Dalam situasi seperti ini, ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan potensi maupun menyampaikan aspirasi menjadi terbatas, sehingga kepentingan publik tidak terwakili secara seimbang.⁹ konfigurasi politik hukum digunakan untuk menilai bagaimana perubahan struktur politik

⁶ "The political context of REDD+ in Indonesia: Constituencies for change," *Environmental Science & Policy* 35 (Januari 2014): 67–75, <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2012.10.001>.

⁷ Ibnu Sina Chandranegara dan Dwi Putri Cahyawati, "Conflict of interest prevention clause in the constitution: The study of the Indonesian Constitution," *Heliyon* 9, no. 3 (2023): e14679, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14679>.

⁸ Diana Komena dan Laily Ratna, "KORELASI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENCAPAI GOOD GOVERNANCE," *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik* 14, no. 2 (2025): 471–80, <https://doi.org/10.32663/vvh7p647>.

⁹ Nirwana Theresya Siboro, "Fast Track Legislation Sebagai Produk Konfigurasi Politik Dan Dampaknya Terhadap Partisipasi Publik," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2026): 110–19, <https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.831>.

mempengaruhi produk hukum,¹⁰. Dengan demikian, hal ini menjadi semakin menarik untuk di telusuri lebih jauh terkait kebijakan administratif dalam penggunaan APBD Kalimantan Timur yang mengalami banyak kontroversi kemudian di analisis melalui kacamata konfigurasi politik dan relasi kekuasaan terhadap produk-produk kebijakan administratif di daerah.

Masalah kebijakan administratif merupakan isu yang sering sekali terjadi kontradiktif antara kebijakan yang dibentuk dengan ke¹¹butuhan masyarakat. Risiko politik dan ketidakpastian kebijakan regional telah diidentifikasi sebagai salah satu risiko terbesar secara global¹². Terdapat semakin banyak literatur tentang bagaimana kapasitas kebijakan membentuk implementasi kebijakan¹³. respons pemerintah daerah merupakan salah satu pengaruh utama terhadap implementasi kebijakan¹⁴. Kebijakan-kebijakan ini berpotensi memengaruhi berbagai aspek kehidupan publik, seperti produktivitas ekonomi, persatuan sosial, keterlibatan politik, dan administrasi perkotaan¹⁵. Penyertaan peraturan dan pedoman multilevel menambah kompleksitas lebih lanjut, sehingga sulit untuk menciptakan kebijakan yang efisien dan kohesif¹⁶.

Relasi kekuasaan di tingkat pemerintah daerah menjadi penentu arah kebijakan administratif terhadap penggunaan anggaran daerah. pemerintah daerah cenderung memprioritaskan bidang kebijakan tertentu dalam perancangan anggaran mereka, ketika mereka beroperasi di bawah kendala kelembagaan dan fiskal yang ketat seperti aturan anggaran berimbang¹⁷. Anggaran publik merupakan domain utama dalam lingkup tata kelola koordinatif pemerintah daerah¹⁸. Kemudian, kesenjangan antara aturan konstitusional dan implementasinya oleh pemerintah merupakan kondisi penting yang memungkinkan reformasi ekonomi¹⁹. Namun, tantangan dalam implementasi seringkali muncul dari

¹⁰ Anissa Septiana dan Ajeng Zatalini Alfiyah Hadi, "MEMBEDAH POLITIK HUKUM GBHN 1978 DAN PPHN: ANTARA SUPREMASI HUKUM DAN DOMINASI KEKUASAAN," *Journal of Studia Legalia* 6, no. 1 (2025), <https://studialegalia.ub.ac.id/index.php/studialegalia/article/view/172>.

¹¹ Shihao Zhu dkk., "How do local governments respond to national urban containment policies? Evidence from China," *Habitat International* 157 (Maret 2025): 103320, <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2025.103320>.

¹² Jingjing Kang dan Hao Yang, "Regional economic policy uncertainty, implicit government guarantees and bank's risk-taking," *International Review of Economics & Finance* 102 (September 2025): 104275, <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104275>.

¹³ Rik Peeters dkk., "How information capacity shapes policy implementation: A comparison of administrative burdens in COVID-19 vaccination programs in the United States, Mexico, and the Netherlands," *Government Information Quarterly* 40, no. 4 (2023): 101871, <https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101871>.

¹⁴ Zhu dkk., "How do local governments respond to national urban containment policies?"

¹⁵ Modupe Odemakin, "Assessing the effectiveness and policy gaps of Turkish government policies in facilitating affordable housing," *Urban Governance* 5, no. 4 (2025): 493–99, <https://doi.org/10.1016/j.ugj.2025.08.001>.

¹⁶ Shiwei Yu dkk., "The impact and path of influence of central–local government policy synergy on renewable energy development: Evidence from China," *Energy Economics* 150 (Oktober 2025): 108846, <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2025.108846>.

¹⁷ Panagiotis Iliopoulos dan Kristof De Witte, "The expenditure composition and trade-offs in local government budgets," *Socio-Economic Planning Sciences* 93 (Juni 2024): 101900, <https://doi.org/10.1016/j.seps.2024.101900>.

¹⁸ Yanan He dkk., "Exploring the drivers of local government budget coordination: A random forest regression analysis," *International Review of Economics & Finance* 93 (Juni 2024): 1104–13, <https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.04.004>.

¹⁹ Sèna Kimm Gnanngnon dan Pinyi Chen, "From institutions to jobs: How governments' compliance with constitutional rules reshapes sectoral employment in Sub-Saharan Africa," *Journal of Government and Economics* 21 (Maret 2026): 100172, <https://doi.org/10.1016/j.jge.2026.100172>.

resistensi perubahan di lingkungan birokrasi²⁰. Disisi lain, efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan anggaran daerah masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya²¹.

METODE

Dalam analisis penelitian ini, akan menjelaskan secara rinci metodologi yang digunakan dalam penelitian tentang Konfigurasi Politik dan Produk Kebijakan Administratif terhadap Relasi Kekuasaan dalam Pengelolaan Anggaran. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan melihat berbagai aspek yang menjadi kendala terhadap kebijakan administratif dalam pengelolaan anggaran di Kalimantan Timur yang di pilih sebagai subjek pembicaraan dalam tulisan ini atas dasar keresahan masyarakat terkait kebijakan-kebijakan yang di tetapkan oleh para penguasa di daerah.

Penelitian ini bersifat kualitatif yang bersandar pada data primer dan data sekunder dengan pendekatan socio-legal. Pendekatan ini digunakan untuk memahami hubungan antara norma hukum administrative, praktik kekuasaan, dan realitas sosial dalam pengelolaan anggaran Pemerintah Kalimantan Timur. Data primer diperoleh melalui observasi terhadap respon publik, analisis pernyataan pejabat, serta pemetaan dinamika sosial-politik dan relasi kekuasaan terkait pengelolaan anggaran daerah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen APBD, berita media nasional dan lokal, jurnal ilmiah, regulasi pemerintah, dan sumber digital lainnya. Faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan anggaran APBD untuk pengadaan mobil dinas Gubernur senilai Rp.8,5 miliar dan anggaran laundry rumah jabatan.

Penelitian ini melibatkan beberapa kelompok informan dan sumber data, yaitu 1) masyarakat sipil, (2) media massa dan situs web berita, (3) akademisi hukum administrasi. Penggunaan sumber data online memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang komprehensif terkait berbagai bentuk Konfigurasi politik dan produk hukum administratif terhadap relasi kekuasaan dalam penggunaan anggaran daerah Kalimantan Timur. Data penelitian di fokuskan pada tiga konteks utama. Pertama, bentuk produk kebijakan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah, Kedua, relasi kekuasaan antara elite politik dan birokrasi. Ketiga, respon sosial terhadap kebijakaan anggaran yang kontroversial.

Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi yang mendalam terhadap data observasi, dan dokumentasi yang telah dikumpulkan. Dengan penyajian kembali atas data untuj memahami isinya, melakukan deskripsi untuk mengidentifikasi pola temuan dengan pandangan untuk memberikan atas makna temuan tersebut. Melalui pendekatan ini, peneliti bertujuan untuk memahami dampak terkait kebijakan administratif dalam penggunaan anggaran daerah Kalimantan Timur dengan mehubungkanya terhadap konfigurasi politik dan relasi kekuasaan. Tahap

²⁰ Luthfi Azhari dkk., "Efektivitas Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," *Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (2025): 116–29, <https://doi.org/10.62383/studi.v2i2.271>.

²¹ Aris Ismail dkk., "Optimalisasi Fungsi dan Peranan DPRD dalam Pengawasan Kebijakan Penggunaan Anggaran APBD di Kabupaten Pematang," *SOSIAL : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS* 3, no. 3 (2025): 40–56, <https://doi.org/10.62383/sosial.v3i3.978>.

analisis ini penting untuk menghasilkan pemahaman dan pengetahuan yang komprehensif dan mendalam dalam penelitian ini.

HASIL

Pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp.8,5 miliar memunculkan kritik luas dari masyarakat karena dianggap menunjukkan praktik politik anggaran yang elitis dalam membuat kebijakan. Pemerintah daerah menggunakan legitimasi administratif melalui regulasi pengadaan dan permendagri sebagai dasar pembenaran kebijakan tersebut. Akibat perilaku tersebut, terjadi gejolak yang sangat besar di dalam masyarakat hingga terjadi demonstrasi oleh ribuan mahasiswa dan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kaltim karena dianggap pemborosan APBN serta gaya hedonism para pejabat pemerintah Kalimantan Timur di tengah situasi ekonomi Negara yang tidak baik akibat geopolitik pada saat sekarang ini. Dengan demikian, dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Kalimantan Timur berdampak pada gejolak masyarakat yang menganggap kebijakan tersebut merupakan pemborosan di saat yang bersamaan banyak daerah-daerah yang sangat membutuhkan bantuan untuk percepatan pembangunan dari dana APBN Kalimantan Timur.

Tabel 1. Pengadaan Mobil Dinas dan Politik Simbolik Kekuasaan

Temuan	Penjelasan	Sumber
1. Pengadaan mobil mewah	Nilai pengadaan mencapai Rp.8,5 miliar	https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8369726/kala-mobil-dinas-rp-8-5-m-disorot-gubernur-kaltim-sebut-ikut-permendagri?utm_source=copy_url&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=kalimantan
2. Legitimasi administratif	Pemerintah menyebut sesuai permendagri	https://kalimantanlive.com/2026/02/28/kpk-soroti-pengadaan-mobil-dinas-gubernur-kaltim-rp-85-miliar-ingatkan-risiko-korupsi
3. Kritik masyarakat	Dinilai tidak empatik terhadap kondisi public	https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8383307/pengadaan-mobil-dinas-gubernur-kaltim-rp-8-5-m-batal-kpk-ada-peran-warga

Data table 1 memperlihatkan pengadaan mobil dinas dan politik simbolik kekuasaan pemerintahan, diantaranya pada sumber 1 menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kalimantan Timur benar melakukan pengadaan mobil mewah dengan nilai yang sangat fantastis senilai Rp.8,5 miliar, sumber 2 memperlihatkan bahwa pemerintah membela diri dengan menegaskan bahwa penggunaan

dana APBD untuk pengadaan mobil dinas para pejabat memiliki legitimasi administratif melalui permendagri sehingga apa yang mereka lakukan tidak dapat disalahkan, sumber 3 menunjukkan akibat dari kebijakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah tentang pengadaan mobil dinas mewah menimbulkan kritik keras di masyarakat Kalimantan Timur.

Penelitian ini menyoroti beberapa indikasi penting terkait permasalahan konfigurasi politik terkait produk kebijakan administratif di Kalimantan Timur yang belakangan ini menuai banyak sorotan akibat kebijakan penggunaan dana APBD, dimana salah satu kebijakan pemerintah adalah pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp.8,5 miliar. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kerja pemerintahan. Namun, hal ini dianggap pemborosan dan sangat merugikan bagi masyarakat di Kalimantan Timur yang masih membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk menyokong pertumbuhan dan percepatan pembangunan. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kebijakan administratif terkait penggunaan APBD di Kalimantan Timur masih belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sering kali produk hasil kebijakan yang dibentuk hanya berorientasi untuk kepentingan para elite penguasa di daerah-daerah tanpa melihat kebutuhan masyarakat dalam hal ini pemerintahan Kalimantan Timur.

Kasus anggaran laundry rumah jabatan sebesar Rp.450 juta menunjukkan bagaimana produk kebijakan administratif dapat kehilangan legitimasi sosial ketika dipersepsikan tidak rasional oleh masyarakat. Pengabaian kepentingan masyarakat di Kalimantan Timur dalam pembentukan kebijakan administratif dalam penggunaan APBD oleh para elit penguasa memicu keresahan masyarakat, dimana harusnya APBD digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, pemerataan kesehatan, kesejahteraan masyarakat serta pengembangan pendidikan diseluruh daerah Kalimantan Timur. Namun, Para pembentuk kebijakan menggunakan sebagian dana tersebut untuk biaya laundry rumah jabatan para pejabat di pemerintahan, hal ini telah keluar dari jalur utama tujuan APBD tersebut diberikan dan merupakan pemborosan. Dengan demikian, literasi terhadap kebijakan administratif yang dibentuk oleh pemerintah Kalimantan Timur sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan kontrol oleh masyarakat untuk setiap kebijakan yang dibentuk oleh para penguasa.

Tabel 2. Anggaran Laundry Rumah Jabatan

Temuan	Penjelasan	Sumber
1. Anggaran laundry Rp.450 juta	Menjadi sorotan publik dan viral di media sosial	https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8476191/pemprov-bantah-laundry-baju-gubernur-wagub-kaltim-rp-450-juta?utm_source=copy_url&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=kalimantan
2. Klarifikasi pemerintah	Disebut untuk keseluruhan operasional rumah jabatan	https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8476191/pemprov-bantah-

		laundry-baju-gubernur-wagub-kaltim-rp-450-juta?utm_source=copy_url&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=kalimantan
3. Respon sosial	Publik melihat adanya pemborosan anggaran	https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MDk2MTYxNjk1ODA2ODYx?story_media_id=3842920245246542112_4844030397&igsh=OXpiemdiZHU5ZW81

Data table 2 memperlihatkan kembali kebijakan administratif yang di bentuk untuk anggaran laundry rumah pejabat senilai Rp.450 juta, sumber 1 menunjukkan bahwasanya kebijakan tersebut benar adanya anggaran sebesar Rp.450 juta dari APBD digunakan untuk biaya laundry rumah para pejabat, sumber 2 mengidentifikasi terkait persoalan ini pemerintah melakukan klarifikasi terkait kebijakan yang mereka lakukan dengan mengatakan bahwa anggaran tersebut di gunakan untuk oprasional seluruh rumah jabatan yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan, sumber 3 menunjukkan bahwa penggunaan anggaran yang begitu besar kembali menimbulkan gejolak di masyarakat karena pemerintah di anggap pemborosan dalam penggunaan APBD untuk hal yang kurang memiliki dampak langsung untuk pembangunan di masyarakat Kalimantan Timur.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan administratif terkait penggunaan anggaran oleh pemerintah untuk anggaran laundry rumah pejabat membuat masyarakat semakin resah, dimana anggaran untuk laundry rumah pejabat ini senilai Rp.450 juta yang dana tersebut di ambil dari APBD Kalimantan Timur. Meskipun hal ini sah secara administratif, tetapi penggunaan anggaran tersebut sangat tidak tepat sasaran, karena pada dasarnya anggaran tersebut di tujukan untuk kebutuhan pembangunan daerah, percepatan pertumbuhan ekonomi dan untuk kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur. Data tersebut menunjukkan bahwa legalitas formal tidak selalu sejalan dengan legitimasi sosial. Meskipun secara administratif dapat dibenarkan, masyarakat tetap menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk ketimpangan prioritas anggaran. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas kebijakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah menjadi persoalan utama terkait lambatnya pertumbuhan dan percepatan pembangunan di daerah Kalimantan Timur.

Tekanan masyarakat sipil dan sorotan media akhirnya mendorong pembatalan pengadaan mobil dinas mewah. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi politik daerah tidak sepenuhnya dominan karena masih terdapat mekanisme kontrol sosial. Literasi masyarakat terkait kontrol sosial sebagai salah satu sarana pengawasan kebijakan administratif yang di bentukan oleh pemerintah menjadi sangat penting, karena tanpa kontrol yang dilakukan oleh masyarakat pengelolaan APBD akan menjadi tidak terarah, dan juga menjadi arena politik untuk para elite yang memiliki kepentingan

terkait hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat menjadi instrument penting sebagai sistem kontrol untuk setiap produk kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah di Kalimantan Timur, masyarakat yang menjadi kontrol sosial akan mampu menekan terjadinya konfigurasi politik dalam produk kebijakan administratif yang dilakukan oleh para elite penguasa di Kalimantan timur. Dengan demikian, semakin besar literasi terkait peran masyarakat sebagai alat check and balances kebijakan yang dibentuk, semakin baik pula kebijakan administratif yang dihasilkan.

Tabel 3. Kontrol Publik terhadap Kebijakan Administratif

Temuan	Penjelasan	Sumber
Tekanan publik	Kritik mahasiswa dan masyarakat sipil	https://www.youtube.com/live/Uc23WJdbsG4?si=8JXxS_6HtHsOVPQF
Pengawasan KPK	Pengadaan dinilai rawan penyimpangan	https://kalimantanlive.com/2026/02/28/kpk-soroti-pengadaan-mobil-dinas-gubernur-kaltim-rp-85-miliar-ingatkan-risiko-korupsi/
Pembatalan pengadaan	Pemerintah menghentikan proses pengadaan	https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8383307/pengadaan-mobil-dinas-gubernur-kaltim-rp-8-5-m-batal-kpk-ada-peran-warga

Data table 3 memperlihatkan kontrol sosial terkait kebijakan administrative yang dibentuk oleh pemerintah menjadi sangat penting untuk dilakukan, sumber 1 tekanan yang dilakukan oleh para mahasiswa dan masyarakat sipil melalui demonstrasi memberi efek langsung terhadap konfigurasi politik terkait kebijakan administrative yang di bentuk oleh para penguasa, sumber 2 hal ini memicu Komisi Pemberantasan Korupsi untuk turun tangan terkait kebijakan administratif yang di bentuk para penguasa karena pengadaan tersebut di anggap bisa terjadi adanya penyimpangan penggunaan anggaran, sumber 3 aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa dan masyarakat di Kalimantan Timur berhasil menekan pemerintah hingga harus membatalkan pengadaan tersebut.

Pengetahuan kurangnya kesadaran pemerintah tentang produk kebijakan administratif di daerah yang terkonfigurasi pada elite kekuasaan, dimana pemerintah tidak terlalu mempermasalahkan terkait kebijakan yang mereka bentuk, karena mereka beranggapan bahwasanya kebijakan administrative yang di bentuk telah sesuai secara legitimasi, sejalan dengan itu, kurangnya pemahaman terkait pembentukan kebijakan yang seharusnya berorientasi dengan kebutuhan masyarakat menyebabkan banyaknya hasil kebijakan yang dibentuk merugikan masyarakat di Kalimantan Timur. Sehingga kebijakan yang di hasilkan hanya untuk hal-hal yang menguntungkan para elite penguasa saja. hal ini mengakibatkan masyarakat menjadi resah dan mengakibatkan terjadi pergolakan demonstrasi di berbagai daerah di Kalimantan Timur yang dilakukan oleh para mahasiswa dan juga masyarakat, dimana mereka meminta pemerintah untuk membatalkan kebijakan tersebut. Dengan demikian, hal ini memperlihatkan bahwa relasi kekuasaan dalam hukum administrasi bersifat

dinamis, masyarakat dan media memiliki peran penting dalam membatasi dominasi kekuasaan eksekutif daerah.

DISKUSI

Penelitian ini menunjukkan bahwa produk kebijakan administratif dalam pengelolaan APBD Kalimantan Timur tidak dapat dipisahkan dari konfigurasi politik yang berkembang di daerah. Pengadaan mobil dinas mewah seharga Rp.8,5 miliar dan anggaran laundry rumah jabatan senilai Rp.450 juta memperlihatkan bagaimana legalitas administratif digunakan sebagai instrument legitimasi kebijakan yang memiliki dimensi simbolik dan politik kekuasaan. Atas hasil penelitian ini, menjadi dasar untuk merumuskan strategi berbasis bukti bagi masyarakat agar dapat secara efektif melindungi dan mengontrol kebijakan administratif yang akan di bentuk. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konfigurasi politik terkait pembentukan produk-produk kebijakan administratif dalam pengelolaan APBD Kalimantan Timur. Melalui pendekatan ini diharapkan hasil penelitian dapat berkontribusi pada upaya yang lebih luas untuk menciptakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih inklusif dan transparan bagi semua pemangku kepentingan dan masyarakat yang terlibat.

Dalam perspektif Michel Foucault di kenal Konsep *governmentality* (*gouvernementalite*) yaitu bagaimana kekuasaan dilaksanakan sebagai sebuah permainan taktis dan strategis yang dilakukan dari titik mana saja.²² Pemerintah daerah menggunakan kekuasaan untuk membentuk kebijakan administratif yang tampak legal dan rasional, namun kepentingan publik bukanlah hasil dari dialog publik, melainkan hasil dari tawar-menawar antar elit dan refleksi kepentingan koalisi politik dan ekonomi.²³ Tata kelola pemerintahan negara modern ditandai oleh otoritas rasional-legal, yang diimplementasikan melalui struktur birokrasi.²⁴ Sehingga dapat dilihat bahwa adanya konfigurasi politik didalam pembentukan produk kebijakan penggunaan anggaran daerah oleh para elite penguasa dengan menetapkan kebijakan yang menguntungkan bagi mereka. Konseptualisasi hegemonik saat ini tentang transisi yang adil, meskipun umumnya diterima sebagai upaya mulia, berisiko mereproduksi struktur kekuasaan yang memprioritaskan jalur sosio-teknis dan rezim pengetahuan tertentu,²⁵ Literasi pemerintah menunjukkan bahwa produk kebijakan administratif tidak dilihat sebagai sumber kepentingan masyarakat yang dipimpinya, tetapi hanya sebagai alat reproduksi penghasil keuntungan bagi para elite penguasa.

Pembentukan produk kebijakan administratif terkait penggunaan APBD Kalimantan Timur untuk pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp.8,5 miliar dan anggaran laundry rumah jabatan

²² TRI UTAMI REZA, "OTORITAS PEREMPUAN DALAM TRADISI TUNGGU TUBANG PERSPEKTIF MICHEL FOUCAULT (Studi Desa Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat)" (diploma, UIN Raden Intan Lampung, 2024), <https://repository.radenintan.ac.id/36217/>.

²³ Hashem Dadashpoor dan Ailin Sheydayi, "Public interest or elite consensus? Contextualizing the construction of public interest in Tehran's urban planning system," *Cities* 174 (Juli 2026): 106989, <https://doi.org/10.1016/j.cities.2026.106989>.

²⁴ Mónica Alcindor dkk., "Urban discourses and rural settlements: Toward a documentary analysis of the effects of governmentality on the built environment in rural Galicia (Spain)," *Habitat International* 156 (Februari 2025): 103251, <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2024.103251>.

²⁵ Carlo Alessandro Castellanelli dkk., "The politics of possibility in just transitions: A Foucauldian reading," *Energy Research & Social Science* 129 (November 2025): 104375, <https://doi.org/10.1016/j.erss.2025.104375>.

sebesar Rp.450 juta menjadi beberapa kebijakan yang sangat kontroversial dan menimbulkan gejolak di dalam masyarakat. Pemerintah demokratis mempertahankan legitimasinya dengan menjawab tuntutan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial.²⁶ Namun dalam hal ini, Kebijakan tersebut menuai berbagai kritik karena dianggap tidak sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat daerah yang harusnya menjadi fokus utama terkait penggunaan APBD. Dalam hal ini, Para pembuat kebijakan pemerintah perlu menekankan pada penciptaan nilai publik yang memiliki dampak positif yang sangat besar bagi warga.²⁷ Namun, produk kebijakan yang di bentuk hanya berorientasi pada kepentingan segelintir elite penguasa saja, peningkatan pengeluaran pemerintah saja dapat menyebabkan tingkat korupsi yang lebih tinggi karena peluang yang diciptakannya untuk menyalahgunakan dana publik.²⁸ Dengan demikian, terlihat jelas bahwa produk-produk kebijakan administratif pemerintah belum mengutamakan kepentingan masyarakat tetapi hanya sebagai reproduksi kekuasaan.

Permasalahan ini menjadi sangat menarik jika di hubungkan dengan teori Konfigurasi Politik otoriter dari Moh. Mahfud MD²⁹, dimana konfigurasi politik otoriter merupakan susunan sistem politik yang lebih memungkinkan Negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijakan Negara.³⁰ Teori ini membantu menjelaskan bahwa karakter kebijakan administratif sangat dipengaruhi oleh dominasi kekuasaan eksekutif dan birokrasi daerah. Dalam perspektif Mahfud MD, setiap produk hukum merupakan refleksi dari konfigurasi politik yang melingkupinya, ketika konfigurasi politik bersifat otoritarian, hukum yang lahir cenderung represif dan elitis.³¹ Meskipun ada banyak alasan kegagalan implementasi, salah satu pendorong potensial adalah perilaku birokrat lokal, khususnya mereka yang bertugas melakukan pengawasan dan implementasi.³² Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa produk kebijakan hukum yang di bentuk oleh pemerintahan daerah terkait penggunaan anggaran APBD Kalimantan Timur merupakan hasil kebijakan konfigurasi politik otoriter. Dimana, produk kebijakan yang lahir cenderung bersifat elitis serta hanya berorientasi pada kepentingan para penguasa.

Di sisi lain, pembatalan kebijakan pemerintah terkait pengadaan mobil dinas gubernur Kalimantan Timur menunjukan bahwa kontrol sosial masih memiliki pengaruh terhadap proses

²⁶ Rui Pedro Lourenço, "Government transparency: Monitoring public policy accumulation and administrative overload," *Government Information Quarterly* 40, no. 1 (2023): 101762, <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101762>.

²⁷ "Public value and public sector accountability in New Zealand," *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 37, no. 3 (2024): 363–92, <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-09-2023-0169>.

²⁸ "The influence of government budgets for anti-corruption efforts and government effectiveness on national transparency levels," *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 38, no. 2 (2026): 318–45, <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2025-0105>.

²⁹ Sugih Ayu Pratitis dkk., "Konfigurasi Politik Di Era Orde Baru Dan Keterkaitannya Dengan Hukum Islam," *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2026): 3081–87, <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i2.15450>.

³⁰ Ayu Lisa Wati, *PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN*, 2024.

³¹ Irfan Nurhakim dan Uu Nurul Huda, "Politik Hukum Pemilu Di Indonesia: Pergeseran Dari Rule By Law Menuju Rule Of Law Dalam Konfigurasi Politik Dan Demokrasi Substantif," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3488–506, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1513>.

³² Jacobus Cilliers dan James Habyarimana, "Addressing weak links in government implementation at scale: Experimental evidence from a school governance reform in Tanzania," *Journal of Development Economics*, 22 Mei 2026, 103824, <https://doi.org/10.1016/j.jdevec.2026.103824>.

kebijakan administratif. media sosial dan platform daring semakin membentuk wacana publik,³³ hal ini sejalan dengan konsep No Viral No Justice,³⁴ dengan beredarnya berita terkait produk kebijakan yang tidak pro terhadap kebutuhan masyarakat yang di bentuk oleh pemerintah dan kemudian berita tersebut menuai sorotan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga pemerintah membatalkan kebijakan tersebut. Meskipun strategi-strategi ini memfasilitasi tujuan pertumbuhan lokal, strategi-strategi tersebut sering kali merusak maksud asli kebijakan untuk mengakomodasi populasi yang paling rentan, dan malah berkontribusi pada suburbanisasi kelompok-kelompok yang kurang beruntung yang didorong oleh pemerintah.³⁵ Dengan demikian, pentingnya partisipasi publik dalam pembangunan perkotaan semakin ditekankan,³⁶ Hal ini dapat dilihat melalui produk-produk kebijakan administratif yang berorientasi pada kepentingan penguasa serta sebagai legitimasi politik elit daerah.

Produk kebijakan pemerintah sering sekali di pengaruhi oleh Konfigurasi Politik, konfigurasi yang menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat dominan dengan sifat yang intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Negara.³⁷ implementasi yang efektif sebagian besar bergantung pada keputusan pemerintah daerah yang menerjemahkan tujuan luas menjadi kebijakan, tindakan, dan hasil yang spesifik konteks.³⁸ Hal ini dapat dilihat dari produk-produk kebijakan publik terkait kewenangan pemerintah daerah dalam menggunakan APBD Kalimantan Timur yang mencerminkan Konfigurasi Otoriter, Sejarah konfigurasi politik tampak bergantian antara konfigurasi politik demokratis dan otoriter.³⁹ Dalam pengelolaan APBD, pemerintah dan elite politik tidak hanya tunduk pada aturan, tetapi juga mereproduksi keuntungan melalui kekuasaan dengan menggunakan kebijakan administratif yang mereka bentuk. Hal ini tidak sesuai dengan Tujuan yang ingin dicapai oleh Negara Indonesia adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual, yang berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila.⁴⁰ Dengan demikian, dapat dilihat bahwa peran para elite penguasa sangat menentukan terkait arah kebijakan yang akan di bentuk terhadap penggunaan APBD Kaliman Timur.

³³ Pei-Hsuan Tsai dkk., "Marketing public policy in the digital age: Government strategies for effective new media engagement under marketing 4.0," *Socio-Economic Planning Sciences* 105 (Juni 2026): 102468, <https://doi.org/10.1016/j.seps.2026.102468>.

³⁴ Dona Budi Kharisma, "No viral no justice: is it a principle of social justice? (Study of viral cases on social media in Indonesia)," *Safer Communities* 24, no. 2 (2024): 103–15, <https://doi.org/10.1108/SC-07-2024-0037>.

³⁵ Jin Zhu, "Strategic compliance: How local governments reshape social housing mandates in China's pro-growth planning regime," *Cities* 171 (April 2026): 106777, <https://doi.org/10.1016/j.cities.2026.106777>.

³⁶ Xi Lu dkk., "What makes e-participation in urban governance effective? Evidence from the government online message board in China, 2011–2021," *Cities* 170 (Maret 2026): 106627, <https://doi.org/10.1016/j.cities.2025.106627>.

³⁷ Indriana Ertanti, "Konfigurasi Politik Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Produk Hukum Di Indonesia," *DIVERSI : Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2021): 281–300, <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i2.2029>.

³⁸ Wikke Novalia dan Reni Suwarso, "An orienting framework of municipal enablers in urban river governance," *APN Science Bulletin*, advance online publication, 27 Juni 2025, <https://doi.org/10.30852/sb.2025.2830>.

³⁹ Peggy Dian Septi Nur Anggraini dan Wardah Yuspin, "DINAMIKA KONFIGURASI POLITIK TERHADAP KARAKTER PRODUK HUKUM ERA PEMERINTAHAN DEMOKRASI DI INDONESIA," *Madani: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 14, no. 1 (2022): 54–73, <https://doi.org/10.52166/madani.v14i1.2883>.

⁴⁰ Yudi Junadi dkk., "URGENSI PEMBATAAN PERIODISASI MASA JABATAN ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PERSPEKTIF KONFIGURASI POLITIK HUKUM INDONESIA," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 2 (2021): 140, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v7i2.2043>.

Melihat sebab-sebab diatas, maka diperlukan adanya reformasi pengawasan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait setiap kebijakan administratif yang akan di tetapkan oleh pemerintah daerah dan disertai dengan kontrol sosial yang harus dilakukan oleh masyarakat terhadap produk-produk kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini Kalimantan Timur. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah sangat diperlukan sebagai solusi praktis agar kebijakan administratif terkait penggunaan anggaran APBD Kalimantan Timur tepat sasaran. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa untuk mewujudkan kebijakan administratif yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Kemudian di perlukanya trasformasi mendasar dalam konfigurasi politik, transformasi tersebut harus mengarah pada sstem yang lebih inklusif, transparan, dan partisipatif, serta memperkuat mekanisme cheks and balances agar kebijakan yang di bentuk tidak lagi menjadi alat kekuasaan semata, melainkan benar-benar berfungsi sebagai instrument keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa produk kebijakan administratif dalam pengelolaan APBD Provinsi Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik elitis-otoriter yang berkembang di daerah. Kasus pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp.8,5 miliar dan anggaran laundry rumah jabatan sebesar Rp.450 juta menjadi bukti nyata bahwa legalitas formal dan legitimasi administratif kerap kali disalahgunakan oleh penguasa untuk mengakomodasi kepentingan politik dan simbol kekuasaan mereka, dari pada merespon kebutuhan riil masyarakat. Realitas ini menegaskan di mana produk hukum yang dilahirkan dalam struktur politik yang hegemonik dan intervioner cenderung bersifat represif serta mengabaikan aspek keadilan, rasionalitas anggaran, maupun nilai keadilan yang berdampak langsung kepada kesejahteraan sosial daerah.

Di sisi lain, dinamika pembatalan pengadaan mobil dinas tersebut membuktikan bahwa relasi kekuasaan dalam hukum administrasi di tingkat lokal tidak sepenuhnya mutlak dan berjalan satu arah. Tekanan publik, aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat, sorotan media digital melalui fenomena “*No Viral No Justice*” serta intervesi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memegang peran krusial sebagai instrument kontrol sosial yang mampu membatasi dominasi kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, diperlukan tranformasi mendasar menuju konfigurasi politik yang lebih inklusif, tranparan, dan partisipatif, yang diperkuat oleh reformasi pengawasan dari pemerintah pusat serta peningkatan literasi kritis masyarakat agar pengelolaan APBD di masa depan benar-benar berorientasi pada kemakmuran publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alcindor, Mónica, Jennifer Prieto, dan Delton Jackson. “Urban discourses and rural settlements: Toward a documentary analysis of the effects of governmentality on the built environment in rural Galicia (Spain).” *Habitat International* 156 (Februari 2025): 103251. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2024.103251>.
- Anggraini, Peggy Dian Septi Nur, dan Wardah Yuspin. “DINAMIKA KONFIGURASI POLITIK TERHADAP KARAKTER PRODUK HUKUM ERA PEMERINTAHAN DEMOKRASI DI INDONESIA.” *Madani: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 14, no. 1 (2022): 54–73. <https://doi.org/10.52166/madani.v14i1.2883>.

- Aris Ismail, Dendy Patrija W, dan Zainal Fatah. "Optimalisasi Fungsi dan Peranan DPRD dalam Pengawasan Kebijakan Penggunaan Anggaran APBD di Kabupaten Pematang Jaya." *SOSIAL : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS* 3, no. 3 (2025): 40–56. <https://doi.org/10.62383/sosial.v3i3.978>.
- Castellanelli, Carlo Alessandro, Constanza Parra, dan Artur da Rosa Pires. "The politics of possibility in just transitions: A Foucauldian reading." *Energy Research & Social Science* 129 (November 2025): 104375. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2025.104375>.
- Chandranegara, Ibnu Sina, dan Dwi Putri Cahyawati. "Conflict of interest prevention clause in the constitution: The study of the Indonesian Constitution." *Heliyon* 9, no. 3 (2023): e14679. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14679>.
- Cilliers, Jacobus, dan James Habyarimana. "Addressing weak links in government implementation at scale: Experimental evidence from a school governance reform in Tanzania." *Journal of Development Economics*, 22 Mei 2026, 103824. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2026.103824>.
- Dadashpoor, Hashem, dan Ailin Sheydayi. "Public interest or elite consensus? Contextualizing the construction of public interest in Tehran's urban planning system." *Cities* 174 (Juli 2026): 106989. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2026.106989>.
- Ertanti, Indriana. "Konfigurasi Politik Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Produk Hukum Di Indonesia." *DIVERSI : Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2021): 281–300. <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i2.2029>.
- Fatimah, Mira, Haryanto Haryanto, dan Nunuk Dwi Retnandari. "Central-Local Government Relations in Regional Planning and Budgeting in Indonesia: Between Autonomy and Control." *Policy & Governance Review* 8, no. 2 (2024): 131–53. <https://doi.org/10.30589/pgr.v8i2.922>.
- Fitria, Fitria, Eko Nuriyatman, Latifah Amir, dan Sitta Saraya. "Administrative Law and the Efficiency of Local Government Budgeting." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (2025): 147–61. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.27598>.
- Gnangnon, Sèna Kimm, dan Pinyi Chen. "From institutions to jobs: How governments' compliance with constitutional rules reshapes sectoral employment in Sub-Saharan Africa." *Journal of Government and Economics* 21 (Maret 2026): 100172. <https://doi.org/10.1016/j.jge.2026.100172>.
- Hamka, Muh, Sakinah Nadir, dan Haryanto. "POLITIK ANGGARAN DAN RELASI AKTOR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH." *Jurnal Politik Profetik* 10, no. 1 (2022): 79–98. <https://doi.org/10.24252/profetik.v10i1a5>.
- He, Yinan, Chao Wu, dan Yuanyuan Fan. "Exploring the drivers of local government budget coordination: A random forest regression analysis." *International Review of Economics & Finance* 93 (Juni 2024): 1104–13. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.04.004>.

- Iliopoulos, Panagiotis, dan Kristof De Witte. "The expenditure composition and trade-offs in local government budgets." *Socio-Economic Planning Sciences* 93 (Juni 2024): 101900. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2024.101900>.
- Junadi, Yudi, Dedi Mulyadi, M. Rendi Aridhayandi, dan Christopher Surya Salim. "URGENSI PEMBATAAN PERIODISASI MASA JABATAN ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PERSPEKTIF KONFIGURASI POLITIK HUKUM INDONESIA." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 2 (2021): 140. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v7i2.2043>.
- Kang, Jingjing, dan Hao Yang. "Regional economic policy uncertainty, implicit government guarantees and bank's risk-taking." *International Review of Economics & Finance* 102 (September 2025): 104275. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104275>.
- Kharisma, Dona Budi. "No viral no justice: is it a principle of social justice? (Study of viral cases on social media in Indonesia)." *Safer Communities* 24, no. 2 (2024): 103–15. <https://doi.org/10.1108/SC-07-2024-0037>.
- Komena, Diana, dan Laily Ratna. "KORELASI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENCAPAI GOOD GOVERNANCE." *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik* 14, no. 2 (2025): 471–80. <https://doi.org/10.32663/vvh7p647>.
- Lourenço, Rui Pedro. "Government transparency: Monitoring public policy accumulation and administrative overload." *Government Information Quarterly* 40, no. 1 (2023): 101762. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101762>.
- Lu, Xi, Xini Zhang, Eckart Lange, Shurui Zheng, dan Zheng Yang. "What makes e-participation in urban governance effective? Evidence from the government online message board in China, 2011–2021." *Cities* 170 (Maret 2026): 106627. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2025.106627>.
- Luthfi Azhari, Tumija Tumija, dan Restu Widyo Sasongko. "Efektivitas Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)." *Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (2025): 116–29. <https://doi.org/10.62383/studi.v2i2.271>.
- McCarthy, John F., Ahmad Dhiaulhaq, Suraya Afiff, dan Kathryn Robinson. "Land reform rationalities and their governance effects in Indonesia: Provoking land politics or addressing adverse formalisation?" *Geoforum* 132 (Juni 2022): 92–102. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.04.008>.
- Najib, Muhammad, dan R. M. Mahendrati. "Pengawasan Internal Hukum Terhadap Penyusunan Anggaran Daerah Di Indonesia." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 6, no. 1 (2026): 10–10. <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3316>.
- Novalia, Wikke, dan Reni Suwarso. "An orienting framework of municipal enablers in urban river governance." *APN Science Bulletin*, advance online publication, 27 Juni 2025. <https://doi.org/10.30852/sb.2025.2830>.
- Nurhakim, Irfan, dan Uu Nurul Huda. "Politik Hukum Pemilu Di Indonesia: Pergeseran Dari Rule By Law Menuju Rule Of Law Dalam Konfigurasi Politik Dan Demokrasi Substantif."

Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 3, no. 4 (2025): 3488–506. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i4.1513>.

Odemakin, Modupe. “Assessing the effectiveness and policy gaps of Turkish government policies in facilitating affordable housing.” *Urban Governance* 5, no. 4 (2025): 493–99. <https://doi.org/10.1016/j.ugj.2025.08.001>.

Peeters, Rik, César Rentería, dan Guillermo M. Cejudo. “How information capacity shapes policy implementation: A comparison of administrative burdens in COVID-19 vaccination programs in the United States, Mexico, and the Netherlands.” *Government Information Quarterly* 40, no. 4 (2023): 101871. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101871>.

Pratitis, Sugih Ayu, Faisar Ananda Arfa, dan M. Syukri Albani Nasution. “Konfigurasi Politik Di Era Orde Baru Dan Keterkaitannya Dengan Hukum Islam.” *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2026): 3081–87. <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i2.15450>.

“Public value and public sector accountability in New Zealand.” *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 37, no. 3 (2024): 363–92. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-09-2023-0169>.

REZA, TRI UTAMI. “OTORITAS PEREMPUAN DALAM TRADISI TUNGGU TUBANG PERSPEKTIF MICHEL FOUCAULT (Studi Desa Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat).” Diploma, UIN Raden Intan Lampung, 2024. <https://repository.radenintan.ac.id/36217/>.

Septiana, Anissa, dan Ajeng Zatalini Alfiah Hadi. “MEMBEDAH POLITIK HUKUM GBHN 1978 DAN PPHN: ANTARA SUPREMASI HUKUM DAN DOMINASI KEKUASAAN.” *Journal of Studia Legalia* 6, no. 1 (2025). <https://studialegalia.ub.ac.id/index.php/studialegalia/article/view/172>.

Siboro, Nirwana Theresya. “Fast Track Legislation Sebagai Produk Konfigurasi Politik Dan Dampaknya Terhadap Partisipasi Publik.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2026): 110–19. <https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.831>.

“The influence of government budgets for anti-corruption efforts and government effectiveness on national transparency levels.” *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 38, no. 2 (2026): 318–45. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2025-0105>.

“The political context of REDD+ in Indonesia: Constituencies for change.” *Environmental Science & Policy* 35 (Januari 2014): 67–75. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2012.10.001>.

Tsai, Pei-Hsuan, Chih-Jou Chen, dan Yi-Sheng Lu. “Marketing public policy in the digital age: Government strategies for effective new media engagement under marketing 4.0.” *Socio-Economic Planning Sciences* 105 (Juni 2026): 102468. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2026.102468>.

Wati, Ayu Lisa. *PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN*. 2024.

- Yu, Shiwei, Yingying Guo, Haopeng Geng, dan Xing Hu. "The impact and path of influence of central–local government policy synergy on renewable energy development: Evidence from China." *Energy Economics* 150 (Oktober 2025): 108846. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2025.108846>.
- Zhu, Jin. "Strategic compliance: How local governments reshape social housing mandates in China's pro-growth planning regime." *Cities* 171 (April 2026): 106777. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2026.106777>.
- Zhu, Shihao, Longfei Zheng, Daquan Huang, dan Yanxu Liu. "How do local governments respond to national urban containment policies? Evidence from China." *Habitat International* 157 (Maret 2025): 103320. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2025.103320>.